

IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH
(MPMBS) DI SMA N 1 SUKOHARJO

Sri Marsini, Sri Witurachmi, Elvia Ivada

Program studi Pendidikan Ekonomi BKK Akuntansi, FKIP Universitas Sebelas Maret

Email: marsiny_siwi05@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di SMA Negeri 1 Sukoharjo, faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan MPMBS, upaya yang dilakukan sekolah untuk memaksimalkan faktor pendukung dan upaya untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan MPMBS. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Sukoharjo. Sumber data berasal dari informan, tempat atau lokasi, dokumen, dan arsip. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa fungsi dalam MPMBS telah digarap dengan baik oleh sekolah meliputi manajemen kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, humas, pendanaan, dan proses belajar mengajar.

ABSTRACT

There are three purposes of this research. First, to know how the School-Based Quality Improvement Management (MPMBS) was being implemented in 1st Senior High School of Sukoharjo (SMAN 1 Sukoharjo). Second, to understand what the supporting and contrary factors of the MPMBS implementation were. Third, to know the actions taken by the School to maximize the supporting factors and to avoid or delete the contrary ones. This is a qualitative research with qualitative discription method. The subject of this research was SMAN 1 Sukoharjo. The data sources which were used in this research are informan, place or location, documentations, and archieves. Informations are gathered by interview, observation and documentation. This study employed triangulation validity test while, interactive analysis was used to do an analytical test. The results showed that some criterias, which are curriculum management, student management, infrastructure, public relations, financing and the process of teaching and learning, in MPMBS were already applied by school. As general, the implementaton of MPMBS in SMAN 1 Sukoharjo was good.

Keywords: Quality, Education, School Based Management.

Pendahuluan.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan adalah hal yang penting bagi semua insan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman pendidikan menjadi kebutuhan pokok. Pendidikan terus mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan zaman di era globalisasi ini, yang menyebabkan kepekaan masyarakat akan perkembangan dalam dunia pendidikan semakin tinggi.

Indonesia sebagai negara berkembang, pernah dihadapkan pada permasalahan pendidikan yaitu tidak meratanya pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan sentralisasi pendidikan. Pada tahun 1999 muncul kebijakan pemerintah, yaitu lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Hal tersebut kemudian disebut sebagai Otonomi Daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Kebijakan otonomi daerah ini mengakibatkan banyak perubahan, salah satunya adalah dalam dunia pendidikan. Adanya otonomi daerah memberikan wewenang yang seluas-luasnya pada daerah untuk mengembangkan pendidikan pada wilayah masing-masing dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah daerah diberikan kekuasaan dan wewenang untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan pada daerah masing-masing. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk menyusun rencana-rencana strategis tentang manajemen pendidikan yang akan dilaksanakan.

Penyusunan kebijakan dan rencana yang dilakukan pemerintah daerah tidak sebebas-bebasnya dilakukan. Kebijakan yang dibuat harus tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Penyusunan kebijakan harus mencerminkan kebutuhan masyarakat

akan pendidikan dan kemampuan masing-masing daerah dalam mengelola pendidikan. Adanya desentralisasi pendidikan diharapkan mampu mengatasi masalah tidak meratanya pendidikan di Indonesia. “Dalam realitas penyelenggaraan otonomi pendidikan program inti dari upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pada hakikatnya juga upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan pada semua bentuk, jenjang, dan jenis pendidikan. Komitmen/kepedulian terhadap peningkatan mutu pendidikan menjadi keharusan bagi setiap daerah di seluruh Republik Indonesia, Oleh karena itu wajar bila desentralisasi dan otonomi pemerintahan berikut penyelenggaraan otonomi pendidikan juga membawa misi dan tugas untuk meningkatkan mutu pendidikan” (Marsus Suti, 2011:4).

Perkembangan yang pesat dalam pendidikan menyebabkan masyarakat semakin menyadari akan pentingnya pendidikan. Kesadaran ini juga disebabkan karena kemajuan IPTEK yang terus berkembang dan mendorong masyarakat untuk mampu mengikutinya. Kualitas pelayanan dan pengelolaan pendidikan yang baik sangat diharapkan oleh masyarakat. Sekolah sebagai lembaga proses belajar mengajar

berlangsung akan memiliki daya tarik jika mempunyai kualitas dan kemampuan memberikan pelayanan yang baik. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk menyekolahkan putra – putri mereka.

Tuntutan masyarakat mendorong sekolah untuk mampu memberikan pelayanan yang maksimal. Kebijakan otonomi daerah yang ada kini diturunkan menjadi kebijakan otonomi sekolah atau satuan pendidikan. Otonomi sekolah merupakan suatu kebijakan yang memberikan kekuasaan kepada sekolah untuk mengelola semua komponen sekolah dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan yang baik bagi masyarakat. “Otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah sesuai peraturan perundangan-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Pengambilan keputusan bersifat partisipatif, yaitu cara pengambilan keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis. Warga sekolah didorong untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah”, (Umiarso & Ghozali, 2010:47).

Otonomi sekolah memberikan kekuasaan dan wewenang kepada sekolah untuk membuat kebijakan dalam manajemen sekolah. Kebijakan inilah yang disebut dengan “*School Based Management*” (SBM) atau Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Menurut Chaprrian, J. (dalam Fattah, 2012:38), “Manajemen berbasis sekolah sebagai terjemahan dari *School Based Management*, adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk mendesain ulang pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah, orang tua siswa dan masyarakat. Manajemen Berbasis Sekolah mengubah sistem pengambilan keputusan dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan dari manajemen ke setiap yang berkepentingan di tingkat lokal (*local Stake holders*)”.

Pengelolaan sekolah yang didasarkan pada kemampuan sekolah bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. “Mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan

pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan pembelajaran tertentu” (Marsus Suti, 2011:2). Konsep manajemen sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan ini selanjutnya dapat disebut sebagai Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). “Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan fleksibilitas/keluwesannya lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong sekolah meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional, sehingga esensi MBS = *otonomi+fleksibilitas+partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah*” (Rivai dan Murni, 2010:163).

Rivai dan Murni (2010:1430) menyatakan tujuan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah adalah (1) meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan

memberdayakan sumber daya yang tersedia, (2) meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama, (3) meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya, (4) meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

MPMBS menuntut sekolah untuk mampu memberdayakan semua sumber daya yang dimiliki sekolah. Sekolah sebagai satuan pendidikan terendah menjadi pusat pengembangan pendidikan. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah sebagai wujud kebijakan desentralisasi dari pemerintah pusat mendorong sekolah untuk lebih mandiri. Kemampuan dan kreativitas dalam mengelola sekolah menjadi perhatian banyak pihak. Berbagai kebijakan yang dibuat sekolah menentukan pada arah perkembangan sekolah tersebut. Sekolah yang tidak mampu memperlihatkan kemampuan dalam mengelola sekolah akan tertinggal dan kalah bersaing dengan sekolah lain.

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah adalah reformasi dalam dunia pendidikan. Saat ini kebijakan

tersebut telah diterapkan oleh banyak sekolah di Indonesia. Kebijakan tersebut dirasa mampu untuk menyelesaikan masalah tidak merata dan tidak adilnya pendidikan yang terjadi di Indonesia. Setiap sekolah dapat menggali potensi dan mengembangkannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pada dasarnya ada prinsip yang melandasi pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Rivai dan Murni (2010:1430), menyatakan ada lima prinsip utama pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, yaitu: (1) Fokus pada mutu, (2) *Bottom-up planning and decision making*, (3) Manajemen yang transparan, (4) Pemberdayaan masyarakat, (5) Peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. SMA Negeri 1 Sukoharjo sebagai sekolah yang akan dijadikan subyek penelitian. Hal ini dikarenakan sekolah ini telah melaksanakan kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, didukung oleh pengamatan awal yang dilakukan penulis yang menunjukkan bahwa SMA Negeri 1 SUKOHARJO menjadi sekolah unggulan

di kabupaten Sukoharjo. Selain itu dari hasil wawancara awal diperoleh informasi bahwa SMA Negeri 1 Sukoharjo mempunyai standar atau definisi operasional mutu yang mendukung pelaksanaan penelitian.

Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Sukoharjo?, (2) Apakah faktor-faktor pendukung pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Sukoharjo?, (3) Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Sukoharjo?, (4) Bagaimanakah upaya sekolah untuk memaksimalkan faktor pendukung pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Sukoharjo?, (5) Bagaimanakah upaya sekolah untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Sukoharjo?.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Sukoharjo, faktor-faktor pendukung pelaksanaan

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Sukoharjo, faktor-faktor penghambat pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Sukoharjo, upaya sekolah untuk memaksimalkan faktor pendukung pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Sukoharjo, upaya sekolah dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Sukoharjo.

Metode Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 1 Sukoharjo. Waktu pelaksanaan dari bulan Oktober samapi Maret yang dimulai dari perencanaan penelitian samapi penyusunan laporan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan, dokumen dan arsip serta tempat dan peristiwa. Pada penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* (sesuai kriteria tertentu). Peneliti memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam tentang permasalahan yang akan diteliti dan dianggap mampu untuk memberikan

informasi yang relevan dan valid atas penelitian yang dilakukan, yaitu kepala sekolah, wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan, wakasek sarana dan prasarana, wakasek humas, guru, dan karyawan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Uji validitas yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data pada penelitian ini dimulai dari reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi, dan penyusunan hipotesis kerja.

Hasil dan Pembahasan.

Fokus penelitian ini meliputi sosialisasi program, pihak yang terlibat, manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen humas, pendanaan, proses belajar mengajar, faktor pendukung, faktor penghambat, upaya memaksimalkan faktor pendukung, serta upaya untuk mengatasi faktor penghambat MPMBS.

Hasil wawancara, dokumen yang diperoleh dan kegiatan observasi menunjukkan bahwa sosialisasi program dan kebijakan sekolah dilakukan melalui rapat. Pihak yang terlibat dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program sekolah adalah semua warga

sekolah yang meliputi kepala sekolah, wakasek, guru, karyawan, orang tua siswa, dan siswa. Pengelolaan kurikulum di SMA N 1 Sukoharjo telah dilaksanakan dengan baik. Kurikulum yang digunakan SMA N 1 Sukoharjo adalah KTSP. Penyusunan kurikulum di SMA N 1 Sukoharjo berdasarkan pada kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan sekolah, namun tetap sesuai dengan peraturan dari pusat. Kurikulum yang disusun mencakup struktur kurikulum yang digunakan, Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), kalender akademik, program pengembangan diri, RPP. Ada beberapa perubahan yang dilakukan pada kurikulum yang digunakan, antara lain jam pelajaran; adanya penilaian karakter dalam RPP; dan program unggulan sekolah (karawitan dan karya ilmiah remaja).

Pengelolaan kesiswaan di SMA N 1 Sukoharjo telah berjalan dengan baik, mulai dari input, proses, dan output. Bentuk kebijakan penerimaan peserta didik baru di SMA N 1 Sukoharjo antara lain dengan membuat beberapa kriteria untuk dapat diterima misalnya ada beberapa tes masuk. Pengelolaan siswa tidak sampai itu saja, tetapi sekolah terus berupaya untuk mengembangkan potensi

dan meningkatkan prestasi siswa melalui KBM dan kegiatan lainnya. Hasil dari pengelolaan yang baik dapat dilihat dari prestasi dan output yang dihasilkan. Siswa SMA N 1 Sukoharjo banyak yang mendapatkan penghargaan atas kejuaraan yang diikuti pada bidangnya masing-masing. Output dari SMA N 1 Sukoharjo dapat dikatakan baik karena secara kuantitas dan kualitas bagus. Kuantitas dapat dilihat dari lulusan siswa yang mencapai 100% setiap tahun rata-rata 80% diterima di PTN, secara kualitas dapat dilihat dari nilai rata-rata Ujian yang berada diatas 7,5.

Kondisi sarana dan prasarana di SMA N 1 Sukoharjo secara umum baik dan memadai untuk kegiatan KBM dan kegiatan sekolah lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana ini dapat membantu meningkatkan pelaksanaan program sekolah dalam upaya mencapai tujuan sekolah. Ketersediaan ruang seperti laboratorium, ruang kesenian, UKS, perpustakaan, ruang multimedia, kamar mandi, kantin serta peralatan belajar di kelas mendukung kegiatan operasional sekolah.

SMA N 1 Sukoharjo berupaya untuk meningkatkan hubungan baik dengan pihak intern atau ekstern sekolah. Secara intern sekolah berupaya memupuk

rasa persaudaraan baik dengan siswa, guru ataupun karyawan melalui kegiatan seperti halal bihalal. Selain itu juga berupaya menampung aspirasi seluruh warga sekolah kemudian disampaikan pada suatu forum, misalnya dengan menyelenggarakan rapat komite.

Sumber pendanaan di SMA N 1 Sukoharjo adalah dari pemerintah karena di Sukoharjo terdapat kebijakan pendidikan gratis. Sekolah tidak diperbolehkan memungut dana dari orang tua. Sumber dana tersebut berasal dari APBN pusat, APBD provinsi, APBD kabupaten. Pengelolaan atau pengalokasian dana tersebut disesuaikan dengan kepentingan sekolah. Pada program akselerasi sekolah mendapat dukungan dari orang tua siswa yang tergabung dalam paguyuban orang tua siswa.

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMA N 1 Sukoharjo dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan baik jadwal pelaksanaan, materi pelajaran sesuai Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Faktor pendukung pelaksanaan MPMBS di SMA N 1 Sukoharjo terdiri dari (1) SDM yang dimiliki bagus (jumlah yang memadai, guru mengajar sesuai bidangnya, memiliki semangat,

loyalitas dan etos kerja yang tinggi), (2) Kondisi peserta didik yang bagus secara kualitas dan kuantitas (sistem penerimaan peserta didik baru dan output yang dihasilkan), (3) Berbagai prestasi lomba yang diraih siswa pada bidang masing-masing, (4) Sarana dan prasarana yang memadai untuk KBM, (5) Mempunyai program unggulan yaitu karawitan dan karya ilmiah siswa, (6) Kepemimpinan yang baik dari kepala sekolah. Upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan faktor pendukung MPMBS di SMA N 1 Sukoharjo adalah dengan peningkatan mutu SDM melalui *workshop*, pelatihan, serta studi banding. Sedangkan untuk sarana dan prasarana upaya yang dilakukan untuk memberdayakan adalah dengan pemanfaatan secara tepat dan pemeliharaan yang baik.

Kendala dalam pelaksanaan MPMBS di SMA N 1 Sukoharjo adalah pendanaan yang terbatas. Adanya pendidikan gratis menjadikan sekolah kurang mendapat dukungan dana dari orang tua, akibatnya tidak tersedia dana yang cukup untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Selain itu kegiatan yang bersifat untuk pengembangan mutu sekolah kurang maksimal. Pendidikan gratis juga menjadikan peran komite sekolah selaku

wakil orang tua siswa kurang maksimal karena orang tua siswa tidak ikut mendanai sekolah. Upaya yang dilakukan SMA N 1 Sukoharjo untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan MPMBS adalah sekolah dapat mengajukan dana pengembangan untuk peningkatan mutu dan perbaikan kepada pemerintah.

Simpulan dan Saran.

Berdasarkan pembahasan dapat ditarik simpulan (1) Pelaksanaan MPMBS di SMA N 1 Sukoharjo kurang maksimal tetapi dapat dikatakan baik. Kurang maksimal karena komite sekolah sebagai pihak yang mewakili orang tua siswa kurang memberikan kontribusi dalam menyusun kebijakan. Hal ini disebabkan oleh adanya pendidikan gratis yang menjadikan sekolah tidak dapat menghimpun dana dari orang tua siswa untuk pengembangan sekolah. Pelaksanaan MPMBS di SMA N 1 Sukoharjo dapat dinyatakan baik karena berdasarkan hasil penelitian pengelolaan aspek-aspek yang dapat didesentarisasikan meliputi pengelolaan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, serta pembelajaran telah dilaksanakan dengan baik, (2) Pelaksanaan MPMBS di SMA N 1 Sukoharjo didukung oleh (a) SDM yang

dimiliki bagus; (b) Kondisi peserta didik yang bagus secara kualitas dan kuantitas; (c) Berbagai prestasi lomba yang diraih siswa pada bidang masing-masing; (d) Sarana dan prasarana yang memadai untuk KBM; (e) Mempunyai program unggulan yaitu karawitan dan karya ilmiah siswa; (f) Kepemimpinan yang baik dari kepala sekolah, (3) Hambatan pelaksanaan MPMBS di SMA N 1 Sukoharjo adalah karena pendanaan yang terbatas, (4) Upaya untuk memaksimalkan faktor pendukung pelaksanaan MPMBS adalah dengan meningkatkan mutu SDM melalui *workshop*; pelatihan-pelatihan; seminar; atau studi banding, sedangkan untuk sarana dan prasarana upaya yang dilakukan sekolah adalah dengan pemanfaatan secara tepat dan pemeliharaan dengan baik atas sarana dan prasarana yang tersedia, (5) Upaya sekolah untuk mengatasi hambatan yang ada adalah dengan mengajukan bantuan dana kepada pemerintah terkait agar pelaksanaan kegiatan operasional untuk meningkatkan mutu dapat dilaksanakan secara maksimal.

Secara teoretis implikasi dari penelitian ini adalah memberikan gambaran yang jelas bahwa Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah

(MPMBS) memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi sekolah untuk mengelola dan mengembangkan sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing, tetapi harus tetap dibawah kendali pusat. Menurut Rivai dan Murni (2010) MPMBS mendorong sekolah untuk mengelola segala sumber daya sekolah dan mampu untuk meningkatkan partisipasi pada masyarakat.

Penelitian ini juga memberikan implikasi praktis yaitu pengelolaan sumber daya yang dimiliki sekolah dengan baik dapat meningkatkan mutu sekolah. Sekolah yang memiliki mutu bagus dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain output yang dihasilkan baik kualitas ataupun kuantitas; prestasi siswa dan sekolah; SDM yang bagus. Pengelolaan sekolah yang baik perlu didukung oleh manajemen kurikulum yang bagus. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi beberapa pihak (warga sekolah) untuk mampu mengembangkan diri dalam melaksanakan kebijakan sekolah. Bagi kepala sekolah dan wakasek dapat digunakan untuk mempertimbangkan dalam menyusun suatu kebijakan atau program sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan sekolah. Bagi guru dapat

digunakan untuk mempertimbangkan langkah-langkah dalam memberikan pengajaran dan bimbingan kepada siswa dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Bagi siswa dapat digunakan untuk mendorong agar mampu menggali segala kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian akan tercipta suatu pengelolaan sumber daya yang baik dalam upaya peningkatan mutu sekolah berdasarkan otonomi sekolah. Selain itu juga bisa menjadi pertimbangan bagi mahasiswa khususnya dalam bidang pendidikan untuk memiliki wawasan tentang kebijakan pengelolaan pendidikan dengan otonomi sekolah yaitu MPMBS yang dapat diaplikasikan ketika bekerja dalam lingkup dunia pendidikan.

Berdasarkan simpulan dan implikasi yang dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan saran-saran, (1) Bagi Kepala sekolah: (a) Mengadakan *workshop-workshop* bagi para guru untuk peningkatan mutu sebagai wujud pemberdayaan SDM selaku pendukung pelaksanaan MPMBS di SMA N 1 Sukoharjo, misalnya *workshop* tentang penulisan karya ilmiah dengan pembicara dari lembaga penelitian; (b) Mengadakan dialog interaktif baik dengan guru, karyawan, atau siswa untuk bertukar pikiran dan menampung aspirasi dari

mereka, misalnya tentang pelaksanaan ekstrakurikuler, tambahan jam pelajaran, atau program kerja OSIS; (c) Bekerjasama dengan pihak luar, misalnya sanggar seni atau stasiun televisi untuk memaksimalkan program unggulan sekolah karawitan agar dapat dikenal publik baik secara nasional ataupun internasional. Selain itu untuk program unggulan Karya Ilmiah sekolah dapat bekerja sama dengan dosen dari luar untuk memberikan bimbingan, (2) Bagi Guru: semakin aktif dan bersemangat dalam melaksanakan tugas baik tugas mengajar atau tugas administrasi serta Ikut mewujudkan sekolah yang berkualitas melalui bimbingan yang diberikan kepada siswa, (3) Bagi Siswa: (a) lebih aktif dalam mengikuti KBM di kelas agar semakin paham tentang materi yang dipelajari dan kemampuan yang dimiliki dapat digali secara maksimal; (b) memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan sekolah dengan cara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah misalnya ekstrakurikuler, dengan demikian bakat yang dimiliki semakin terasah; (c) aktif dalam menyampaikan aspirasi yang dimiliki untuk memberikan masukan pada sekolah melalui OSIS yang kemudian disampaikan kepada kepala sekolah dan guru, (4) Bagi Orang Tua

Siswa: hendaknya mengetahui bahwa sehingga untuk mendukung dalam upaya mengembangkan dan terlaksananya program tersebut orang tua meningkatkan prestasi siswa perlu adanya perlu membuat kesepakatan dengan sekolah program-program pengembangan yang untuk memberikan bantuan dana (iuran) pelaksanaannya membutuhkan dana, yang sifatnya tidak memberatkan.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Melton Putra.
- Fattah, Nanang. 2012. *Sistem Penjaminan Mutu*. Bandung: PT Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya.
- Rivai, Veithzal dan Sylviana Murni. 2010. *Education Management (Analisis Teori dan Praktik)*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada
- Umiarso dan Imam Gojali. 2010. *Manajemen Mutu Sekolah Di Era Otonomi Pendidikan*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Agustinus Bandur. 2009. *"The Implementation of School-Based Management in Indonesia: Creating Conflicts in Regional Levels"*. Journal of NTT Studies Vol 1 No1: 17.
- Heyward, M., Cannon, R.A., & Sarjono. (2011). *"Implementing school-based management in Indonesia"*. RTI Press publication No. OP-0006-1109. Research Triangle Park, NC: RTI Press. Retrieved [date] from <http://www.rti.org/rtipress>
- Marsus Suti. 2011. *"Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan"*. Jurnal MEDTEK, Volume 3, Nomor 2
- Sarjani, Bambang. 2007. *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Bebas Sekolah di SMP N 1 Temanggung*. Surakarta: Program Pasca Sarjana UNS.
- Tim Dosen. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP UNS*. Surakarta: UNS Press